

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kur Selatan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Siam Kelerey^{1*}, Junaidi², Arista Fauzi Kartika Sari³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: siyamkelirey@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of transparency, accountability, and community empowerment on village fund allocation in Kur Selatan District. The research method used is quantitative with a descriptive-analytical approach. Data were collected through questionnaires distributed to village officials and community members involved in village fund management. The data were analyzed using multiple linear regression to examine the effect of each independent variable on the dependent variable. The results show that transparency, accountability, and community empowerment have a positive and significant influence on village fund allocation in Kur Selatan District. These findings emphasize the importance of participatory village governance in achieving effective village financial management.

Keywords: *Transparency, accountability, community empowerment, village fund allocation.*

PENDAHULUAN

Menurut Lailiani (2021), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sumber pendanaan desa yang berasal dari beberapa sumber. Pertama, dari bagi hasil pajak daerah. Kedua, dari sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dari pemerintah pusat. Dana ini didistribusikan ke desa-desa secara proporsional. Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) juga dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Transparansi dalam sistem pengelolaan dan pemerintahan desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka. Prinsip transparansi memastikan setiap orang dapat memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara publik. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, semuanya harus dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin yang baik (Salri dan Mildalwalti, 2018)

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan yang telah diterima. Akuntabilitas berperan penting dalam kehidupan dan perkembangan dalam sistem yang transparan, demokratis, serta adanya kebebasan berpendapat (Kumalasari & Riharjo, 2016). Selain itu, peningkatan pengelolaan dan penyebaran informasi di sektor publik sangat penting untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Semua itu bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel (Luju et al., 2020).

Program pemberdayaan masyarakat umumnya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Habib, 2021). Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan dan papan.

Desa Rumoin merupakan salah satu desa yang ada di Pulau Kur Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku. Dengan Total penduduk sebanyak 402 jiwa yang terdiri dari 106 jiwa penduduk laki-laki dan 296 jiwa penduduk perempuan. Data tersebut diperoleh langsung dari kantor Desa Rumoin. Masyarakat Desa Rumoin pada umumnya bermata pencaharian sebagian

besar berada di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kur Selatan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
4. Bagaimana pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan kur selatan terhadap pengelolaan alokasi dana desa?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pemberdayaan Masyarakat desa di Kecamatan Kur Selatan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori Keagenan (*agency theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan timbal balik antara pihak manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan, *agency* merupakan orang yang diserahkan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan atas nama pihak lain. *Principal* adalah pemilik usaha yang memberikan perizinan kepada *agent* untuk membuat tugas – tugas tertentu untuk menjaga dan mengawasi agen dari tugas – tugas tersebut. Jika dari kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang sama, maka agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan *principal* (Putri et al., 2021).

b. Transparansi

Menurut Kristianten (2016), transparansi mengacu pada kesiapan pemerintah untuk memberikan informasi kepada pihak lain yang membutuhkan terkait dengan tindakan yang melibatkan administrasi sumber daya publik.

c. Akuntabilitas

Menurut Ma'mun (2023), akuntabilitas adalah dasar utama terjadinya sistem pemerintahan yang baik dan menjadi salah satu bahan referensi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

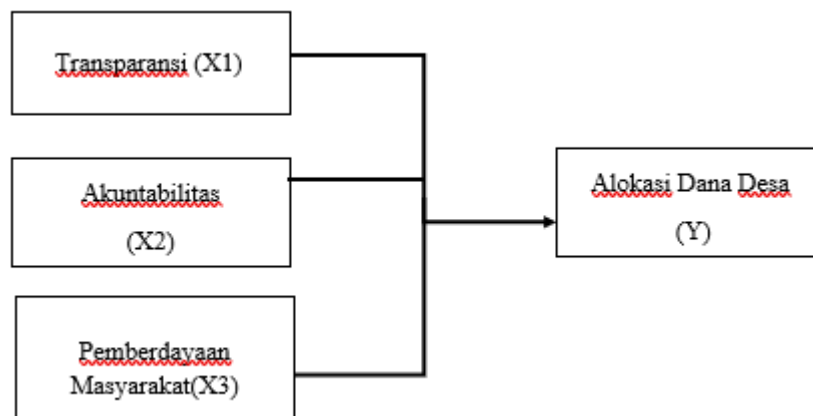
d. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Sumodiningrat, 2009).

e. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Rahman (2020), alokasi dana desa merupakan bagian dari perimbangan yang dialokasikan untuk kabupaten/kota melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat. Dana dihitung setelah pengurangan dana alokasi khusus dari total dana perimbangan yang diterima oleh daerah tersebut.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Pendekatan yang diaplikasikan pada penelitian ini yakni kuantitatif dengan penyebaran kuesioner melalui *Google Form*. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual, Maluku Tenggara. Waktu yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah dimulai pada bulan Februari 2025 sampai bulan Agustus 2025.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat Desa di Kecamatan Kur Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *non random sampling* atau biasa disebut *purposive sampling* dengan kriteria yang diambil adalah aparat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan alokasi dana desa, Masyarakat desa yang mengetahui dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bersumber dari dana desa, Responden yang berdomisili di wilayah kecamatan Kur Selatan.

Definisi Operasional Variabel

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah sebagai pembuat, pelaksana, serta penanggung jawab dari segala macam kebijakan yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya. Menurut Kristianten (2016), indikator Transparansi adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran
2. Kerangka regulasi untuk memastikan transparansi
3. Keterbukaan proses
4. Keterbukaan, transparansi, dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran

b. Akuntabilitas

Menurut Ma'mun (2023), Akuntabilitas adalah dasar utama terjadinya sistem pemerintahan yang baik dan menjadi salah satu bahan referensi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Menurut Yanto dan Aqfir (2020), indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas proses
2. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

c. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat

perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Sumodiningrat, 2009). Menurut Habib (2021), indikator tingkat perkembangan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan infrastruktur
2. Perkembangan fasilitas umum
3. Perkembangan akses informasi
4. Perkembangan kualitas sumber daya manusia
5. Perkembangan pendapatan penduduk.

d. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran keuangan dari pemerintah kepada desa. Dana ini bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten (Anjar, 2019). Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1, indikator pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Transparan.
2. Akuntabel.
3. Partisipatif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Transparansi	X1.1	0,712	0,2319	Valid
	X1.2	0,738	0,2319	Valid
	X1.3	0,761	0,2319	Valid
	X1.4	0,741	0,2319	Valid
	X1.5	0,689	0,2319	Valid
	X1.6	0,783	0,2319	Valid
	X1.7	0,723	0,2319	Valid
Akuntabilitas	X2.1	0,744	0,2319	Valid
	X2.2	0,887	0,2319	Valid
	X2.3	0,860	0,2319	Valid
	X2.4	0,773	0,2319	Valid
	X2.5	0,580	0,2319	Valid
	X2.6	0,600	0,2319	Valid
	X2.7	0,592	0,2319	Valid
Pemberdayaan Masyarakat	X3.1	0,789	0,2319	Valid
	X3.2	0,707	0,2319	Valid
	X3.3	0,793	0,2319	Valid
Alokasi Dana Desa	Y.1	0,754	0,2319	Valid
	Y.2	0,764	0,2319	Valid
	Y.3	0,793	0,2319	Valid
	Y.4	0,565	0,2319	Valid
	Y.5	0,547	0,2319	Valid
	Y.6	0,686	0,2319	Valid

Sumber : Olah Data 2024

Pada penelitian ini diketahui nilai koefisien korelasi (r-hitung) masing-masing item

pernyataan dibandingkan dengan nilai r tabel. Jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ dengan tarif signifikansi 0,05 (5%), maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Nilai r tabel dengan jumlah $n = 72$, nilai dari sampel $(n-2) = 72-2 = 70$ sebesar 0.2319. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan dapat dinyatakan bahwa kuesioner yang didapatkan adalah valid dan dapat digunakan untuk penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Transparansi (X1)	0.853	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0.853	Reliabel
Pemberdayaan Masyarakat (X3)	0.798	Reliabel
Alokasi Dana Desa (Y)	0.769	Reliabel

Sumber : Olah Data 2024

Hasil dapat diketahui bahwa pada pengujian reliabilitas dilakukan berdasarkan item pernyataan pada setiap variabel yang dapat dilihat hasilnya adalah nilai *Cronbach's Alpha* > Batas Reliabilitas sebesar 0,60 maka item pernyataan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	Transparansi_X1	Akuntabilitas_X2	Pemberdayaan Masyarakat_X3	Alokasi dana desa_Y
N	72	72	72	72
Normal Mean	.0000000	.0000000	.0000000	.0000000
Parameters ^a Std. Deviation	1.23824584	1.30057513	1.37804450	1.10194321
Most Absolute	.304	.360	.387	.303
Extreme Positive	.093	.051	.009	.080
Differences Negative	-.204	-.160	-.287	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z	2.208	1.605	2.287	.580
Asymp. Sig. (2-tailed)	.192	.283	.222	.889

Sumber : Olah Data 2024

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi (X1) memiliki nilai K-S sebesar 2,208 dengan nilai asymp.sig (2 tailed) sebesar 0,192. Variabel akuntabilitas (X2) memiliki nilai K-S sebesar 1,605 dengan nilai asymp.sig (2 tailed) sebesar 0,283 Variabel pemberdayaan masyarakat (X3) memiliki nilai K-S sebesar 2,287 dengan nilai asymp.sig (2 tailed) sebesar 0,222. Variabel alokasi dana desa (Y) memiliki nilai K-S sebesar 0,580 dengan nilai asymp.sig (2 tailed) sebesar 0,889. Nilai Asymp-sig (2 tailed) keempat variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Transparansi_X1	.509	1.965
Akuntabilitas_X2	.417	2.401
Pemberdayaan Masyarakat_X3	.404	2.474

Sumber : Olah Data 2024

Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa variabel transparansi (X1) memiliki nilai VIF sebesar 1,965 dengan nilai *tolerance* 0,509. Variabel akuntabilitas (X2) memiliki nilai VIF sebesar 2,401 dengan nilai *tolerance* 0,417. Variabel pemberdayaan Masyarakat (X3) memiliki nilai VIF sebesar 2,474 dengan nilai *tolerance* 0,404. Ketiga variabel tersebut menunjukkan

nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ untuk variabel transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan pemberdayaan masyarakat (X3) sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji glejser tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.982	2.091		3.818	.000
Transparansi_X1	-.041	.061	-.101	-.678	.500
Akuntabilitas_X2	-.054	.093	-.096	-.584	.561
Pemberdayaan Masyarakat X3	-.290	.145	-.333	-1.997	.070

Sumber : Olah Data 2024

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.807	1.763		4.429	.000
	X1	.230	.048	.290	4.785	.000
	X2	.394	.064	.359	6.190	.000
	X3	.706	.064	.533	11.020	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Olah Data 2024

Dari hasil uji regresi linear berganda diatas dapat dipresentasikan sebagai berikut :

- Variabel transparansi (X1) memiliki nilai Koefisien 0,230 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada transparansi (X1) akan meningkatkan nilai alokasi dana desa (Y) sebesar 0,230 satuan. Tanda positif artinya jika variabel transparansi meningkat maka alokasi dana desa cenderung meningkat juga.
- Variabel akuntabilitas (X2) memiliki nilai Koefisien 0,394 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada akuntabilitas (X2) akan meningkatkan nilai alokasi dana desa (Y) sebesar 0,394 satuan. Tanda positif artinya jika variabel akuntabilitas meningkat maka alokasi dana desa juga naik.
- Variabel pemberdayaan masyarakat (X3) memiliki nilai Koefisien 0,706 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada pemberdayaan masyarakat (X3) akan meningkatkan nilai alokasi dana desa (Y) sebesar 0,706 satuan. Tanda positif artinya jika variabel pemberdayaan masyarakat meningkat maka alokasi dana desa juga meningkat.

Uji Hipotesis

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 7. Hasil Uji F (Uji Simultan) ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	205.355	3	68.452	147.675	.000 ^a
	Residual	31.520	68	.464		
	Total	236.875	71			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Olah Data 2024

Hasil dari uji F hitung 147,675 dengan nilai signifikansi F 0,000. Karena nilai

signifikansi F $0,000 < 0,05$. Menunjukkan bahwa variabel independen transparansi (X1), akuntabilitas (X2) dan pemberdayaan masyarakat (X3) bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi dana desa (Y).

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 8. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.807	1.763		4.429	.000
	X1	.230	.048	.290	4.785	.000
	X2	.394	.064	.359	6.190	.000
	X3	.706	.064	.533	11.020	.000
a. Dependent Variable: Y						

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Olah Data 2024

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas

- Variabel transparansi (X1) memiliki nilai t uji sebesar 4,785 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa $0,000 < 0,05$ maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya variabel transparansi (X1) berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) transparansi (X1) berpengaruh terhadap alokasi dana desa (Y) diterima.
- Variabel akuntabilitas (X2) memiliki nilai t uji sebesar 6,190 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa $0,000 < 0,05$ maka H2 diterima dan H0 ditolak artinya variabel akuntabilitas (X2) berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) akuntabilitas (X2) berpengaruh terhadap alokasi dana desa (Y) diterima.
- Variabel pemberdayaan masyarakat (X3) memiliki nilai t uji sebesar 11,020 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa $0,000 < 0,05$ maka H3 diterima dan H0 ditolak artinya variabel pemberdayaan masyarakat (X3) berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) pemberdayaan masyarakat (X3) berpengaruh terhadap alokasi dana desa (Y) diterima.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.931 ^a	.867	.861	.68083

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Olah Data 2024

Berdasarkan pada tabel dapat diketahui bahwa nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,861 atau 86,1%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan pemberdayaan Masyarakat (X3) menjelaskan variabel alokasi dana desa sebesar 86,1% sisanya yaitu 13,9% dijelaskan oleh prediktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi Terhadap Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4.12. Variabel transparansi (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 4,785 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa $0,000 < 0,05$ maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya variabel transparansi (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi dana desa. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) telah membuktikan terdapat pengaruh positif terhadap alokasi dana desa. Dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa aparat desa memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat mengenai alokasi

dana desa.

Pemerintah desa secara konsisten melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyusunan arah kebijakan APBDes, sehingga kebutuhan dan aspirasi warga dapat terakomodasi dengan baik. Selain itu, pemerintah desa selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari masyarakat terkait perencanaan anggaran, yang menunjukkan adanya komitmen terhadap partisipasi publik.

Proses pelaporan progres kemajuan pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan secara rutin, dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan akuntabel. Kantor desa juga menyediakan papan informasi yang memuat data penggunaan keuangan desa, sehingga informasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang membutuhkan. Keterbukaan informasi ini meningkatkan rasa percaya masyarakat dan memastikan bahwa dana desa dialokasikan secara tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan bersama. Dengan demikian, transparansi yang baik mampu mendorong pengelolaan dan alokasi dana desa yang lebih optimal. Transparansi berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa artinya semakin tinggi nilai transparansi maka semakin berkualitas manajemen dalam alokasi dana desa.

Ramadhani & Yulianti(2021) menjelaskan bahwa transparansi ditunjukkan dengan pemerintahan yang memiliki keterbukaan, kemudahan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi terkait alokasi dana desa. Teori keagenan menyatakan bahwa dalam alokasi dana desa mungkin terjadi ketidakseimbangan bahwa dalam alokasi dana desa mungkin terjadi ketidakseimbangan informasi antara pihak yang memberi kuasa (masyarakat desa) dan pihak yang melaksanakan tugas (pemerintah desa). Dalam hal ini, masyarakat desa sebagai pihak yang memberi kuasa mungkin tidak memperoleh informasi yang sama dengan pemerintah desa sebagai pihak yang melaksanakan tugas.

Dengan adanya tingkat transparansi yang tinggi akan terjadi pengaruh yang signifikan dalam mendapatkan informasi yang lengkap dan konsisten bagi para pemangku kepentingan. Hal ini akan membantu mengurangi ketimpangan informasi yang ada. Menurut Nugroho et al., (2022), didapat kesimpulan bahwa apabila suatu pemerintah menerapkan prinsip transparansi dengan tepat, pengelolaan dana desa dalam pemerintahan tersebut juga akan lancar. Pengelolaan alokasi dana desa ditandai dengan transparansi melalui upaya pemerintah desa dalam memberikan informasi yang mudah diakses dan tersedia bagi Masyarakat. Temuan sejalan dengan Ramadhani dan Yulianti (2021), Nugroho et al. (2022), Hidayatullah dan Afiqoh (2023), Ma'mun (2023), dan Yanti et al., (2024) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Alokasi Dana Desa

Variabel akuntabilitas (X2) memiliki nilai t uji sebesar 6,190 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa $0,000 < 0,05$ maka H2 diterima dan H0 ditolak artinya variabel akuntabilitas (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi dana desa. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) telah membuktikan terdapat pengaruh positif terhadap alokasi dana desa. Dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa pemerintah desa selalu menyusun perencanaan anggaran yang matang disertai dengan rencana kinerja sebelumnya untuk mengevaluasi perkembangan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Setiap kegiatan keuangan yang dilakukan tercatat dengan baik sehingga seluruh transaksi dapat ditelusuri secara jelas. Kinerja pemerintah desa dapat diukur karena selalu dilengkapi dengan laporan kinerja yang sistematis. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pemerintah desa menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja secara tertulis, tepat waktu, serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, laporan tersebut juga melalui proses pemeriksaan atau audit untuk memastikan keakuratan dan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku. Praktik akuntabilitas ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana desa dialokasikan secara

efisien, tepat sasaran, serta sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Dengan demikian, praktik akuntabilitas ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung alokasi dana desa yang efisien, tepat sasaran, dan sesuai tujuan pembangunan. tingginya akuntabilitas pemerintah desa berkontribusi langsung terhadap optimalisasi alokasi dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sukmawati dan Nurfitriani (2019) dan Angelia et al., (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Adanya akuntabilitas yang baik dalam alokasi dana desa menggambarkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan peraturan yang telah ditetapkan serta program kegiatan yang dijalankan mampu dipertanggungjawabkan, baik kepada pemerintah pusat maupun masyarakat. Akuntabilitas dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang sesuai dan tepat waktu. Dengan begitu, semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka tingkat kualitas pengelolaan dana desa tersebut juga terbilang sudah cukup optimal.

Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Tingkat akuntabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa juga cukup optimal. Hal ini dikarenakan pemerintah yang memiliki tingkat akuntabilitas yang baik artinya pemerintah tersebut dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan dana desanya, baik kepada peraturan yang telah ditetapkan, pemerintah pusat, maupun Masyarakat (Irawan et al, 2022).

Temuan sejalan dengan Sukmawati dan Nurfitriani (2019), Angelia et al., (2020), Irawan et al., (2022), Hidayatullah dan Afiqoh (2023), Nurfitri dan Ratnawati (2023), dan Ma'mun (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap alokasi dana.

Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa

Variabel pemberdayaan masyarakat (X3) memiliki nilai t uji sebesar 11,020 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa $0,000 < 0,05$ maka H3 diterima dan H0 ditolak artinya variabel pemberdayaan masyarakat (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi dana desa. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) telah membuktikan terdapat pengaruh positif terhadap alokasi dana desa . Dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa Pembangunan fasilitas umum seperti balai desa, posyandu, dan pasar menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga masyarakat dapat menikmati sarana yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan sosial, kesehatan, dan ekonomi. Akses masyarakat terhadap informasi desa juga semakin baik melalui berbagai media dan kegiatan sosialisasi, yang memungkinkan warga untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selain itu, dukungan dana desa untuk pendidikan dan pelatihan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas diri, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap kemajuan desa. Pemberdayaan ini tidak hanya memperkuat partisipasi dan kemandirian warga, tetapi juga memastikan bahwa alokasi dana desa digunakan secara efektif dan bermanfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mangen et al., (2019) menyatakan bahwa alokasi dana desa mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan mampu memberdayakan warga masyarakat dalam urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi meskipun indikator kesehatan tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan Masyarakat. Menurut Fajri et al., (2021) semakin tinggi pemberdayaan masyarakat, maka semakin tinggi pula kuantitas individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Hidayatullah dan Afiqoh (2023) semakin banyak masyarakat yang terlibat maka semakin banyak juga rasa tanggung jawab individu tersebut untuk menjalankan putusan yang telah diperoleh dan pembangunan akan menjadi semakin baik. Pengelolaan alokasi dana desa akan semakin efisien jika terjadi peningkatan dalam pemberdayaan masyarakat terkait pelaksanaan pemerintah dan pengawasan aktivitas keuangan desa.

Pemberdayaan Masyarakat dalam prosedur alokasi dana desa sejak pelaksanaan,

penentuan rencana hingga monitoring dan evaluasi. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik memperjelas bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengupayakan keberlanjutan dengan pemberdayaan masyarakat. Tentu saja teori agensi juga menyebutkan variabel pemberdayaan masyarakat dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan kegiatan keuangan desa, pengelolaan alokasi dana desa akan menjadi lebih efisien (Nugroho et al., 2022).

Temuan sejalan dengan Magen, Peswarissa dan Palimbu (2019), Nugroho et al., (2022), Hidayatullah dan Afiqoh (2023), Nurfitri dan Ratnawati (2023), Ma'mun (2023), dan Yanti et al., (2024) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
2. Variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
3. Variabel pemberdayaan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Keterbatasan

1. Dalam pelaksanaan pembagian kuesioner, banyak masyarakat yang tidak mau menjawab atau mengisi pertanyaan kuesioner karena takut akan terjadi sesuatu apabila ia mengisi kuesioner yang telah dibagikan.
2. Variabel dalam penelitian ini hanya berfokus pada aspek alokasi dana desa, sehingga belum mencakup variabel lain yang juga berpotensi mempengaruhi alokasi dana desa, seperti faktor sosial, budaya, partisipasi politik, pengelolaan keuangan desa maupun kebijakan eksternal.

Saran

1. Sebelum melaksanakan penyebaran kuesioner kepada masyarakat, penelitian sebaiknya menjelaskan tujuan dan juga sasaran dari kuesioner tersebut secara jelas kepada masyarakat, agar masyarakat tidak takut untuk mengisi kuesionernya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan topik dana desa lainnya, sehingga dapat diketahui program mana saja yang memiliki dampak besar dalam meningkatkan efektivitas alokasi dana desa dan menyoroti pengelolaan keuangan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. (2011). Community Development, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.
- Anjar, A. S. S. (2019). Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial. Deepublish.
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. De La Macca.
- Hidayatullah, S., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Transparency, Accountability, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma).
- Irawan, F., Kusumastuti, R., & Gandy, W. M. Z. (2022). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Siau dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 5(2), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa: Vol. Erlangga (R. Rahmat, Ed.).
- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi

- Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya*, 6(2), 1794–1805.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>
- Pakpahan, S., & Halawa, F. A. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Hilizoliga Berbasis Web. *Jurnal Teknik Informatika Unika St. Thomas (JTIUST)*.
- Ramadhani, N. S. , & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 561–571.
- Rozaki, A. (2005). *Prakarsa desentralisasi dan otonomi desa* (Cet. 2). IRE .
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik* .
- Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (A. Refika, Ed.).
- Yanti, M. P., Julica, A. L., & Yunita, H. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabiitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Tren Bisnis Global* , 4 no 2.
- Yanto, E., & Aqfir. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. In *Economy Deposit Journal* (Vol. 2, Issue 2).
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Mangen, Rudi, Pesiwarissa, Eduard Lodewyk, & Palimbu, Lamba Toding. (2019). Pengaruh alokasi dana desa (studi kasus) dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Yeretuar Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire. *FOKUS Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1(2), 92–104.
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209–227.